BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku diberbagai Negara (Pandiangan, 2008). Menurut Pandiangan, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara didunia mengenakan pajak kepada warganya kecuali negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sumber utama penerimaan negara, tidak mengenakan pajak . Bagi Indonesia pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting sebagai urat nadi kehidupan bangsa artinya penerimaan pajak digunakan dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pandiangan, 2008).

Tiap negara membuat aturan dan ketentuan dalam pengenaan dan memungut pajak yang umumnya meliputi prinsip-prinsip atau kaidah dalam perpajakan (Harahap, 2004). Menurut Harahap, misalnya aspek keadilan dalam pengenaannya, adanya rasa nyaman bagi pembayar pajak, besaran atau jumlah pajak yang proporsional (efisien), efektif dan mudah dalam pemungutannya secara administratif dan mekanisme perpajakan, hal ini tidak terlepas dari peranan pemerintah yang telah memperbaiki sistem perpajakan nasional agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih mandiri dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunannya dalam arti tidak 2 terlalu bergantung pada pinjaman luar negeri. Kontribusi penerimaan pajak

terhadap penerimaan negara dari tahun ke tahun semakin meningkat, seiring dengan semakin menurunnya peranan sektor migas dalam penerimaan negara (Harahap, 2004).

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat (Resmi, 2008).Menurut Resmi Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber penerimaan negara) dan fungsi *regulerend* (mengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2008). Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008).

Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menetukan tercapainya rencana penerimaan pajak (Gunadi, 2004). Menurut Gunadi, penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap*. Besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*), oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Gunadi, 2004). Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana Wajib Pajak mematuhi undang-undang perpajakan dan

memenuhi bidang perpajakan, misal jika Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajak terutangnya tepat waktu, maka Wajib Pajak dapat dianggap patuh (Gunadi, 2004).

Kepatuhan wajib pajak merupakan kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya**.** Siti Kurnia Rahayu (2010:138). Kepatuhan Wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment system*, dimana wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Siti Kurnia Rahayu (2010:137).

Mengingat ciri khas atau karakteristik pajak yang berbeda dengan pungutan-pungutan lain yang dilakukan pemerintah, bahwa pungutan pajak adalah merupakan pungutan yang wajib disetor oleh rakyat atau orang pribadi maupun badan yang telah dinyatakan menjadi Wajib Pajak kepada negara dengan tidak adanya kontribusi secara langsung yang diterima oleh pembayar pajak, hal ini diperlukan adanya kesadaran, pelayanan, kepatuhan Wajib Pajak terhadap manfaat membayar pajak kepada negara (Nasution Darmin, 2008).

Untuk itu pihaknya berupaya meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak diantaranya menciptakan kesadaran bahwa membayar pajak menjadi sebuah kebanggaan.Dirjen pajak mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak untuk

mencapai target penerimaan dan peningkatan pajak.Upaya korpsnya perlu mendapat dukungan dari seluruh masyarakat (Fuad Rahmany, 2011).

Fenomena yang terjadi di KPP Pratama Majalaya, setelah dilakukan pemeriksaan,ternyata sampai saat ini dalam proses penyampaian SPT masa dan tahunan WP badan dan OP sering terlambat untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya **(**Riduan, 2012**)**. Wajib pajak akan menyampaikan SPT bila sudah mendapat surat teguran, jadi hal ini memperlihatkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah **(**Riduan, 2012**).**

Kepatuhan Pajak memerlukan *tax law* berupa pemeriksaan pajak dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah,diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu,pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:244).

Untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:252). Hal ini mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi WP untuk melakukan tindakan kecurangan dengan melakukan *tax evasion*, sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:149).

Menurut Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Majalaya, Masalah dari pemeriksaan pajak yaitu wp tidak mau memberikan data atau dokumen yang lengkap (Riduan, 2012). Sehingga para pemeriksa pajak tidak mendapatkan data, dokumen, dan catatan yang diperlukan untuk proses pemeriksaan pajak (Riduan, 2012).

Agar pelaksanaan pemeriksaan pajak berjalan dengan baik maka dibutuhkan sistem informasi yang berguna untuk menghasilkan informasi secara cepat, tepat dan akurat. Sistem informasi adalah komponen-komponen dari subsistem yang saling berhubungan dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi. Peranan computer sangat besar dalam sistem informasi bila dimanfaatkan secara optimal, itu akan menghasilkan informasi yang berkualitas diantaranya informasi yang akurat, tepat waktu, relevan dan lengkap (Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, 2011:14)

Pengetahuan tentang Pemeriksa Pajak mengenai aplikasi dan data yang dimiliki oleh wajib pajak masih belum maksimal sehingga menjadi kendala dalam hal penggunaan pendekatan teknik audit berbantuan computer (Agung Darono, 2009). Menurut Agung Darono, hal ini dapat saja terjadi di dalam penggunaan sistem informasi. Pengetahuan dan pemahaman pemeriksa pajak tentang struktur basis data, alur bisnis ataupun karakteristik sistem aplikasi menjadi sangat penting sehingga pemeriksa dapat menentukan data mana saja yang diperlukan untuk pengujian pemeriksaan (Agung Darono, 2009).

Komputerisasi juga sering kali mempengaruhi pemeriksaan sistem informasi, kemampuan komputer membawa pengaruh luas terhadap sistem informasi,

diantaranya informasi tersebut akurat, cepat dan tepat, konsekuensi di terapkan teknologi komputer dalam pengolahan data tentunya akan berpengaruh terhadap pemeriksaan (Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Anggadini, 2011:226).

Agus Martowardojo menyatakan bahwa Ada masalah di pemeriksaan, proses pemeriksaan masih lemah, isu kualitas sistem informasi yang belum optimal, disebabkan kondisi server yang ada di Direktorat Jenderal Pajak kadang-kadang bermasalah (Ramdhania El Hida, 2011**).**

Menurut fungsional pemeriksa pajak, bahwa sistem informasi di divisi atau bagian pemeriksaan mempunyai kendala pada jaringan internetnya, jaringan internet yang bermasalah membuat para pemeriksa pajak sering gagal dalam penginputan data dalam program ALPP (sistem aplikasi khusus pemeriksaan) (Budi, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut dengan judul :

“Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya pada Kepatuhan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kondisi jaringan internet bermasalah dan keadaan server pada Dirjen Pajak bermasalah.
2. Wajib pajak tidak mau memberikan data atau dokumen yang lengkap
3. Wajib pajak tidak tepat waktu membayar pajak karena terlambat dalam penyampaian SPT Tahunan dan Masa.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman mengenai pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan pajak dengan mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil yang diharapkan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi yang berguna bagi pengaruh sistem informasi terhadap pemeriksaan pajak serta implikasinya terhadap kepatuhan pajak sehingga untuk perkembangan selanjutnya menjadi semakin baik.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat secara akademis sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai sistem informasi, pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak dan mengetahui aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Bagi KPP Pratama di Wilayah Bandung

   Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk KPP Pratama di Wilayah Bandung mengenai sistem informasi, pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak.

3. Bagi Peneliti Lain

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama, yaitu sistem informasi, pemeriksaan pajak dan kepatuhan pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada KPP Pratama di Wilayah Bandung. Ini adalah daftar nama KPP di Wilayah Bandung beserta alamatnya.

Tabel 1.1
Lokasi Penelitian

No	Nama KPP	Alamat KPP
1	KPP Pratama Bojonagara	Jl. Asia Afrika No.114
2	KPP Pratama Cibeunying	Jl. Purnawarman No. 114
3	KPP Pratama Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No. 781
4	KPP Pratama Karees	Jl. Ibrahim Adjie No. 372
5	KPP Pratama Tegallega	Jl. Soekarno Hatta No. 216
6	KPP Pratama Soreang	Jl. Raya Cimareme No. 205
7	KPP Pratama Majalaya	Jl. Peta No. 7 Lingkar Selatan

Adapun waktu pelaksanaan dimulai pada maret 2012 sampai dengan juli 2012.

Tabel 1.2
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
	Tahap Persiapan	**Maret 2012**	**April 2012**	**Mei 2012**	**Juni 2012**	**Juli 2012**
I	1. Bimbingan dengan dosen Pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■	■			
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentuka tempat penelitian		■	■		
II	**Tahap Pelaksanaan**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta Surat pengantar ke perusahaan		■			
III	3. Penelitian di perusahaan			■	■	
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
	Tahap Pelaporan					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■